

## PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL TINGKAT SEKOLAH MENENGAH UMUM DI KALIMANTAN TENGAH

REDDY SIRAM  
FKIP Univ. Palangkaraya

**ABSTRACT.** *In Central Kalimantan the development of the curriculum on local content subject area for the SMUs focusses on growing rubber and rattan. The content of the material accompanying the textbooks on local content subject area covers 7 topics that focusses mainly on field work rather than theory. Those topics are : 1) the conditions for growing; 2) the cultivation of plants; 3) planting in the field; 4) nursing the plants; 5) plant diseases; 6) harvesting and production; 7) processing the product.*

*Based on the data analysis of the curriculum validation and the content validation it is revealed that the curriculum on the local content subject area concerning the cultivation of rubber and rattan is suitable for the SMUs in Central Kalimantan.*

### Pendahuluan

Banyak masalah yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Mahmud (1990) mengidentifikasi adanya empat masalah pokok pendidikan nasional, yaitu: pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pendidikan. Sedangkan Ardhana (1992) menyatakan, bahwa pendidikan kita sekarang ini dihadapkan pada empat masalah besar, yaitu: mutu, pemerataan, motivasi, serta terbatasnya sumberdaya dan sumberdana pendidikan. Dalam hal relevansi pendidikan misalnya, diakui oleh para pakar pendidikan bahwa lulusan pendidikan formal tidak dapat melakukan hal-hal

praktis yang dapat diterapkan pada masalah kebutuhan sosial. Ini bertolak dari arti terminologi pendidikan yaitu kesesuaian pendidikan dengan keadaan individu, orang tua, masyarakat, dan negara yang sedang membangun (Mahmud, 1990: 51). Sehubungan dengan relevansi pendidikan ini, Ardhana (1992) mengemukakan, bahwa tampaknya pendidikan kita sekarang ini lebih menekankan pada akumulasi pengetahuan yang bersifat verbal dari pada penguasaan keterampilan, internalisasi nilai-nilai dan sikap, serta pembentukan kepribadian. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mengatasi semua masalah yang telah disebutkan di atas? Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab telah melakukan berbagai upaya untuk membenahinya. Salah satu di antaranya adalah mengadakan "pembaharuan" kurikulum pada semua jenjang pendidikan formal yang ada.

Menurut Soedijarto, pembaharuan kurikulum bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses belajar yang dihayati para siswa (dalam Mahmud, 1980:52). Asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa mutu lulusan dalam bersikap, kemampuan, dan pengetahuannya. Sedangkan sikap, kemampuan, dan pengetahuan lulusan dipengaruhi oleh kualitas dan proses belajar yang dialaminya.

Dari segi pengelolaan, pengembangan kurikulum dibedakan antara yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentral desentral (Sukamadinata, 1988: 216). Pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi disusun oleh suatu tim khusus di tingkat pusat. Kurikulum ini seragam bagi suatu negara, daerah, atau jenjang/jenis sekolah. Indonesia saat ini menggunakan model sentralisasi, terutama di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Seluruh wilayah di tanah air menggunakan kurikulum tunggal, yang tentu saja mempunyai kelemahan, di samping kelebihanannya. Berbeda dengan kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah atau kelompok sekolah tertentu di suatu wilayah atau daerah. Kurikulum jenis ini digunakan oleh suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum seperti ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah dalam lingkungan tersebut. Konsekwensinya adalah kurikulum, dalam hal ini isi kurikulum, sangat beragam, dimana setiap sekolah atau wilayah memiliki kurikulum sendiri-sendiri. Namun demikian, kurikulum seperti ini dianggap cukup realitas.

Seperti halnya kurikulum yang sentralisasi, kurikulum yang desentralisasi ini juga mengandung kelebihan dan kelemahan. Sukmadinata (1988: 219) mengungkapkan kelebihan kurikulum ini di antaranya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat: sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan profesional, finansial, maupun

managerial; disusun oleh guru-guru sendiri sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya; dan ada motivasi pada sekolah (kepala sekolah, guru) untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang terbaik, dan hal ini mendukung terjadinya kompetisi dalam pengembangan kurikulum. Sedang beberapa kelemahan kurikulum model ini, adalah: tidak adanya keseragaman: tidak adanya standar penilaian yang sama bagi setiap sekolah atau wilayah; menyulitkan siswa bila terjadi perpindahan ke sekolah/wilayah lain; sukar untuk mengadakan penilaian dan pengelolaan secara nasional; dan belum semua sekolah/daerah memiliki kesiapan menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Untuk mengatasi kelemahan pada kedua bentuk kurikulum di atas, maka dipakailah bentuk campuran yang biasa dikenal dengan nama "sentral-desentral". Dalam bentuk kurikulum seperti ini, peranan untuk pengembangan kurikulum tidak hanya domonopoli pihak pemerintah pusat ataupun oleh daerah, melainkan masing-masing mempunyai peranan yang sama. Dalam batas-batas tertentu, kurikulum yang sentral- desentral justru memberi peran kepada guru lebih besar jika dibandingkan dengan kurikulum yang dikelola secara sentralisasi. Guru aktif berpartisipasi dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh bagi sekolahnya, di samping turut memberi andil dalam merumuskan komponen-komponen dan unsur kurikulum. Dengan kegiatan seperti ini, guru mempunyai perasaan turut memiliki kurikulum dan terdorong untuk mengembangkan kurikulum. Oleh karena para guru sejak awal sudah dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, maka mereka akan memahami dan menguasai bentuk kerikulumnya, sehingga pada pelaksanaan dikelas nanti akan lebih baik, lancar, dan tepat. Peran guru telah bergeser dari sekedar pengguna kurikulum, menjadi perencana, pemikir, penyusun, pengembang, sekaligus juga sebagai pelaksana dan penilai kurikulum.

Idealnya, seperti di atas itulah peran yang harus dimainkan para guru dalam pengembangan kurikulum. Tetapi dibalik itu, mampukan para guru melakukannya? Apakah para guru di Indonesia saat ini memiliki bakal pengetahuan yang memadai untuk itu? Bukankah justru para guru saat ini terlalu banyak terlibat dalam berbagai kegiatan yang non akademis sifatnya? Masih adakah waktu yang dimiliki para guru untuk memikirkan sekolahnya, pengembangan kurikulumnya, sementara dia sendiri harus bergelut dengan kegiatan lain demi menghidupi sanak-keluarganya karena penghasilan dari sektor ini amat tidak memadai? Bertolak dari pemikiran-pemikiran itulah maka peran pengembangan kurikulum, perlu pula dilakukan oleh pihak-pihak tertentu meminati bidang ini. Hal itu akan membantu meringankan beban para guru. Lebih dari itu, kurikulum muatan lokal (produk yang dihasilkan) diharapkan akan memberikan pedoman dan areal kerja siap pakai lebih baik dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini disadari oleh

pihak, termasuk para pengamat pendidikan, bahwa pengembangan kurikulum muatan lokal di semua jenjang pendidikan formal amat diperlukan. Namun khusus pada tingkat Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) di seluruh Indonesia, hal ini belum terlaksana sesuai harapan, kalau tidak harus dikatakan belum terlaksana sama sekali.

Perluah pengembangan muatan lokal dalam kurikulum SMU di Kalimantan Tengah? Menjawab pertanyaan ini, pihak kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah menyatakan "sangat perlu". Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Propinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana halnya propinsi-propinsi lainnya di tanah air, memiliki spesifikasi tertentu yang perlu diajarkan kepada para siswa di daerah ini, misalnya bidang pertanian, perikanan, kehutanan, kebudayaan, dan sebagainya.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengembangan kurikulum muatan lokal dilaksanakan, terutama bagi SMU di Kalimantan Tengah.

### Permasalahan

Terbentuknya kurikulum lokal bagi setiap sekolah dan masyarakat setempat akan mengatasi berbagai akibat yang muncul karenanya. Akibat-akibat yang dapat diidentifikasi jika kurikulum muatan lokal tidak diupayakan kehadirannya, adalah:

1. Secara umum, kebijaksanaan Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang perlunya diupayakan perwujudan kurikulum muatan lokal bagi setiap sekolah tidak terpenuhi, yang disebabkan ketidak-mampuan pihak sekolah untuk melakukannya. Konsekwensi lanjut dari hal ini, adalah Pemerintah tidak akan memberikan peluang lebih besar kepada daerah/wilayah/sekolah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokalnya. Jika hal ini terjadi, maka dapat diduga bahwa kurikulum yang akan dipakai oleh semua sekolah akan seragam. Tentu saja hal ini tidak menguntungkan bagi sekolah/masyarakat di berbagai daerah. Kondisi seperti ini nampaknya akan merupakan ironi di balik pengakuan akan adanya kebhinekaan budaya, kebiasaan, dan adat-istiadat bagi setiap daerah di tanah air yang seharusnya dilestarikan di sekolah.
2. Sekolah tidak mempunyai relevansi dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat setempat, sementara ukuran relevansi adalah sejauh mana sekolah mampu mempersiapkan kebutuhan peserta didik yang harus segera dipenuhi. Dalam hubunga ini Othaniel (1969) menunjukkan rele-

vansi mata pelajaran yang dapat membantu peserta didik adalah : (a) memilih dan mengikuti suatu pekerjaan, (b) melatih warga melaksanakan tugas, (c) mengikatkan hubungan pribadi, dan (d) mengambil bagian dalam melaksanakan aktivitas kebudayaan.

3. Terbentuknya kurikulum muatan lokal jenis keterampilan bercocok tanam karet dan rotan bagi SMU dan masyarakat di Kalimantan Tengah akan sangat membantu dalam upaya pembudidayaan jenis tanaman perkebunan tersebut dimasa-masa yang akan datang. Mengajarkan jenis keterampilan bercocok tanam karet dan rotan di sekolah (SMU) sekaligus bermakna sebagai upaya sekolah menyahuti secara kebijakan pemerintah di daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang menjadi tanaman perkebunan karet dan rotan sebagai tanaman primadona.
4. Pengajaran jenis keterampilan bercocok tanam Karet dan Rotan bagi siswa SMU di Kalimantan Tengah diupayakan demi menggugah kesadaran dan kemampuan mereka untuk membudi-dayakan jenis tanaman. Hal ini penting, karena pengusahaan penanaman karet dan rotan didaerah Kalimantan Tengah selama ini hanya dilakukan oleh petani/para orang tua, yang dikatakan tidak pernah mengenal sekolah. Oleh karena itu, jika upaya bercocok tanam karet dan rotan dilakukan oleh para siswa (tamatan sekolah) diharapkan akan dapat menghasilkan produksi lebih banyak, seiring dengan aplikasi pengetahuan yang diperoleh dari sekolah.

### Tujuan Pengembangan

Secara umum pengembangan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan kurikulum muatan lokal tingkat SMU bidang keterampilan pertanian bercocok tanam karet dan rotan yang dapat digunakan oleh SMU didaerah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Menemukan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengembangan muatan lokal dalam kurikulum SMU didaerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Pertanyaan mendasar yang perlu dikemukakan dalam hubungan ini adalah, mengapa pengembangan ini dilakukan terhadap jenis tanaman perkebunan karet dan rotan, dan bukan jenis tanaman lainnya? Jawaban yang dapat diajukan adalah, jenis tanaman perkebunan karet dan rotan, pengusahaannya oleh para petani didaerah Kalimantan Tengah, melebihi jenis tanaman lainnya. Disamping itu, ketersediaan lahan, ke-

cocokkan iklim, kemudahan dalam perawatan/pemeliharaan, tanaman yang lebih mudah diatasi, memungkinkan jenis tanaman ini lebih diminati oleh masyarakat.

### Pentingnya Pengembangan

Pengembangan muatan lokal jenis keterampilan bercocok tanam karet dan rotan dalam kurikulum SMU di Kalimantan Tengah penting dilakukan karena:

1. Lulusan SMU selama ini amat sulit diserap di berbagai lapangan kerja, karena mereka tidak memiliki bekal keterampilan. Pendidikan keterampilan, sesungguhnya dapat diajarkan kepada para siswa melalui kurikulum muatan lokal. Persoalannya sekarang adalah pada umumnya SMU di seluruh Indonesia dan khususnya di daerah Kalimantan Tengah, tidak mempunyai kurikulum muatan lokal untuk jenis-jenis keterampilan tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya kesulitan belajar bagi siswa. Oleh karena itu, tersusunnya kurikulum muatan lokal diharapkan dapat mengatasi hal ini. Dengan adanya pengajaran muatan lokal, siswa dibantu untuk mengenal dan memasuki lapangan kerja.
2. Pengajaran muatan lokal perlu bagi siswa SMU karena muatan lokal erat kaitannya dengan pengajaran berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh lingkungan sekolah. Dalam hubungan ini, perlu dikemukakan bahwa sebagian besar siswa SMU yang telah tamat sekolah, tidak melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan ekonomi orang tua yang tidak memadai. Oleh karena itu, dengan pengajaran muatan lokal diharapkan dapat memberi bekal keterampilan kepada siswa agar bisa segera bekerja. Khusus bagi siswa SMU di Kalimantan Tengah, pengajaran keterampilan bercocok tanam karet dan rotan diberikan kepada mereka mengingat jenis keterampilan ini dapat segera diterapkan dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga kekhawatiran akan "menganggur" setamat SMU tidak perlu dirisaukan. Kondisi seperti ini juga didukung oleh : (a) sumber daya alam yang berupa tersedianya lahan untuk jenis tanaman ini cukup luas, (b) pemasarannya yang cukup baik, (c) masyarakat Kalimantan Tengah 80% pekerjaan utamanya petani (d) prospek pengembangan usaha yang cerah, dan (e) kebijakan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang menetapkan tanaman karet dan rotan sebagai tanaman primadona.

### *Kondisi wilayah*

#### 1. Geografis

Secara geografis, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan luasnya wilayah lebih kurang 153.3644 km<sup>2</sup> terletak di daerah khatulistiwa antara: 0°45' lintang utara 3°30' lintang selatan 111°-116° Bujur Timur Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah pada :

Adapun batas-batas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dan Propinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

#### 2. Topografis

Dilihat secara topografis, Kalimantan Tengah dapat dibagi atas bagian-bagian yang membentang dari barat ke Timur serta membujur dari utara ke selatan sebagai berikut;

- a. Bagian sebelah selatan daerah pantai dan rawa-rawa mempunyai ketinggian 0 - 50 m dari permukaan laut yang mempunyai elevasi 0% - 8% serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai potensi banjir cukup besar.
- b. Bagian tengah merupakan daratan (Plateau) dan perbukitan dengan kemiringan 8% - 15% dengan ketinggian 50 - 150 m dari permukaan laut.
- c. Bagian utara dan barat daya merupakan perbukitan dan bergunung-gunung serta pegunungan dengan kemiringan 15% - 25%.

Dalam pada itu, letak Kabupaten dan Kotamadya secara topografis menempati daerah sebagai berikut :

- a. Kabupaten kotawaringin barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kapuas terdiri dari pantai rawa-rawa, daratan berbukit bergunung.
- b. Kotamadya Palangka Raya dan Kabupaten Barito Selatan terdiri daratan berawa sampai berikut.
- c. Kabupaten Barito Utara merupakan daerah berbukit dan bergunung.

#### 3. Iklim

Kalimantan Tengah secara umum termasuk daerah beriklim tropis dengan temperatur bervariasi rata-rata 29 derajat, temperatur absolut/maksimal mencapai 36 derajat dari mulai ketinggian 0 - 50 m dari permukaan laut. Angin musim barat dan tenggara yang berganti setiap enam bulan sekali mempengaruhi bulan kering dan bulan basah/hujan setiap tahun meskipun terjadi hujan hampir sepanjang tahun. Curah hujan berkisar 2000 - 3560 mm pertahun. Faktor iklim seperti suhu yang bervariasi, curah hujan yang besar dan banyaknya hari hujan tiap tahun, disertai keadaan tanah yang relatif rendah kesuburannya serta hutan hujan tropika yang lebat merupakan hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam mengembangkan pertanian tanaman pangan maupun perkebunan dan lain-lain.

#### 4. Geologi Tata Lingkungan

Secara regional keadaan morfologi daerah Kalimantan Tengah sebagian besar merupakan daerah daratan rendah yang meliputi daerah selatan sampai tengah memanjang dari timur ke barat merupakan pegunungan. Berdasarkan morfologi dan kegiatannya, maka daerah Kalimantan Tengah dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) satuan morfologi yang terdiri dari:

- (1) Daratan pantai: terdapat didaerah sepanjang pantai dan merupakan daerah daratan yang mempunyai ketinggian/elevasi berkisar antara 0% - 18%, dipengaruhi oleh pasang surut.
- (2) Daratan sungai: terdapat sepanjang tepi sungai mempunyai ketinggian/elevasi berkisar antara 0 - 50 m serta mempunyai kemiringan antara 0 - 18%.
- (3) Daratan rawa: terdapat didaerah tidak jauh dari pantai sungai yang merupakan daerah datar berawa-rawa, serta mempunyai elevasi berkisar antara 5 - 50 m dan dengan kemiringan topografis berkisar antara 0-18%.
- (4) Daratan Tinggi : terdapat dibagian tengah, mulai dari timur sampai ke barat agak memanjang kearah selatan barat daya. Daerah ini mempunyai elevasi berkisar antara 50 - 150 m dengan kemiringan berkisar antara 18 % - 36%.
- (5) Perbukitan : terdapat pada bagian tengah agak keutara memanjang dari timur ke barat, dan sebagian kecil daerah barat daya, daerah ini mempunyai elevasi berkisar

antara 50 - 300 m dan mempunyai kemiringan berkisar antara 36% - 84%.

- (6) Pegunungan : terdapat didaerah bagian utara, memanjang dari timur ke barat dengan elevasi lebih besar dari 300 meter serta mempunyai kemiringan lebih besar dari 84%. Kalimantan Tengah Dalam Angka, 1990.

### Potensi Wilayah

#### *Sumber Daya Manusia*

Jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 1971 sebesar 701.936 jiwa yang terdiri dari 354.010 jiwa laki-laki dan 347.926 jiwa perempuan, dan pada tahun 1980 bertambah menjadi 960.834 jiwa yang terdiri dari 493.709 jiwa laki-laki dan 567.125 jiwa perempuan, sedangkan pada tahun 1987 menjadi sebesar 1.286.401 jiwa yang terdiri dari 657.379 laki-laki dan 629.022 jiwa perempuan. Selama periode 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 3.55% pertahun, sedangkan selama periode 1980-1987 laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 4.26% pertahun, dan selama pelita IV rata-rata sebesar 3.40% peraturan. Tingginya angka pertumbuhan rata-rata ini terutama disebabkan oleh banyaknya migrasi yang masuk kedaerah Kalimantan Tengah pada tahun-tahun tersebut baik dalam rangka program transmigrasi umum maupun spontan.

Penduduk Kalimantan Tengah tergolong usia dimana penduduk berumur 0 - 9 tahun pada tahun 1971 sebesar 34.78%, pada tahun 1980 sebesar 32.70%, pada tahun 1984 sebesar 32.24% dan pada tahun 1987 sebesar 32.18%. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 1971 tercatat sebesar 457.811 jiwa, pada tahun 1980 meningkat menjadi 646.674 jiwa dan pada tahun 1983 meningkat menjadi 762.961 jiwa dan pada tahun 1987 meningkat menjadi 872.438 jiwa, rata-rata pertumbuhan usia kerja selama pelita IV sebesar 3.42% pertahun. Pada tahun 1971 jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 209.254 jiwa meningkat menjadi 367.467 jiwa pada tahun 1980, dan meningkat menjadi 526.957 jiwa pada tahun 1983, dan pada tahun 1987 menjadi 505.957 jiwa. Perkembangan angkatan kerja selama pelita IV rata-rata sebesar 3.944% pertahun.

Sebagian besar (69.49%) penduduk hidup dan bekerja pada sektor pertanian, termasuk kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Selebihnya bekerja pada sektor pertambangan dan penggalian 1.27% industri

4.87%, listrik dan air minum 0.09%. Bangunan konstruksi 2.11%, perdagangan 8,79%, angkutan/komunikasi 1,80%, bank dan lembaga keuangan 0.08%. Jasa-jasa 11,47% dan lapangan kerja lainnya 0,03% (Repelita V, 1989/1990- 1993/1994) Kalimantan Tengah, 1989.

### **Kurikulum Pendidikan Menengah dan Tujuan Pembangunan**

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 dinyatakan, bahwa pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa (PP 29/1990, pasal 1 ayat 2).

Para siswa SMU, sesuai dengan umur mereka yaitu sekitar 16-19 tahun, mampu membedakan antara dunia kerja dan dunia belajar. Oleh karena itu, para siswa ini perlu dibantu untuk mengaitkan persyaratan belajar dengan persyaratan kerja (Napitupulu, 1988: 19-23). Pada jenis pendidikan menengah kejuruan, para siswa sudah harus melihat bagaimana jenis keterampilan yang dikuasainya agar dapat menjadi bekal untuk mendapatkan nafkah sehari-hari. Ini berarti, bahwa para siswa memerlukan lebih banyak latihan, agar keterampilan yang mereka memiliki dapat siap pakai.

Kurikulum merupakan subject matter atau sekelompok yang harus dipelajari oleh siswa (Taylor, 1973: 153- 177). Siswa membutuhkan gambaran tentang subjek pelajaran yang relevan, dan guru perlu membangkitkan minat belajar para siswa. Belajar, secara psikologis menyebabkan siswa berani mengubah perilakunya. Perubahan ini dapat ditunjukkan sebagai keluaran yang diharapkan, dan merupakan pengalaman kurikuler siswa itu sendiri.

Para ahli pendidikan menyatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemajuan suatu bangsa maka tengoklah pendidikannya. Makin maju pendidikan di negara tersebut maka makin maju pula negaranya. Sementara di pihak lain, juga sering terdengar bahwa pendidikan adalah "bisnis besar" dan telah terbukti membantu sangat besar pada pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. (Sarojo, 1988).

Sebagai bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pasal UUSPN yang menyatakan, bahwa :

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan Nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen, atau bahkan pula masyarakat yang heterogen: masyarakat tani, pedagang, pegawai, dan lain-lain.

#### *Perubahan Sosial dan Kurikulum Muatan Lokal*

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat memberikan tugas yang lebih luas dan lebih berat pada sekolah. Sekolah yang tradisional yang hanya menoleh ke belakang pasti tidak dapat memberikan pendidikan yang relevan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dewasa ini, maka segala sesuatu akan cepat menjadi usang disebabkan oleh cepatnya perubahan. Oleh karena itu, setiap bangsa akan terbelakang jika tidak cepat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Demikian pula halnya dengan setiap daerah di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tidak akan luput dari pengaruh arus perubahan yang melanda dunia saat ini dan bergerak begitu cepat.

Bagaimanakah hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kurikulum sekolah? Dalam menjawab pertanyaan ini, Hovle (1973) menyatakan, bahwa perubahan kurikulum adalah berbagai perubahan pendidikan yang pada gilirannya merupakan salah satu bentuk perubahan sosial. Istilah perubahan kurikulum (*curriculum change*), menurut Hoyle, secara umum disejajarkan penggunaannya dengan istilah pengembangan kurikulum.

Sekolah yang inovatis tidak hanya mengadopsi sesuatu yang baru, melainkan juga mengadopsi beberapa inovasi yang disertai penolakan terhadap hal-hal lain tergantung pada relevansi kebutuhan sekolah pada waktu tertentu (Hoyle, 1973). Dengan demikian sekolah tersebut lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan baru dan memiliki kualitas inovasi secara kolektif.

Soedijarto (1991: 145) menyatakan, bahwa mengoptimalkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang strategis bagi pembinaan generasi muda untuk menjadi manusia yang digariskan dalam GBHN 1988 adalah tugas utama perencana dan pelaksana sistem pendidikan dalam merencanakan kurikulum pendidikan. Berdasarkan pandangan ini, maka pengembangan

kurikulum harus berpengetahuan luas serta sangat sensitif dan penuh rasa keingin-tahuan terhadap isu yang beredar di sekitarnya. Hal ini sejalin dengan harapan masyarakat, bahwa sekolah adalah alat mengubah dan memperbaiki masyarakat, atau dipandang sebagai suatu lembaga yang membawa modernisasi dalam lingkungan masyarakatnya dengan memasukkan cara-cara hidup baru berkenaan dengan kesehatan, pertanian, makanan, dan pakaian.

Menurut Soedijarto (1977), pembaharuan kurikulum mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses belajar yang dihayati para siswa. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa mutu pendidikan pada hakikatnya dapat dilihat pada mutu lulusan dalam bersikap, kemampuan, dan pengetahuannya. Sedangkan sikap, kemampuan dan pengetahuan lulusan dipengaruhi oleh kualitas dan proses belajar yang dialaminya.

#### Daftar Pustaka

- Answar, M. 1989. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* Jakarta: Depdikbud, Ditjen Dikti, P2LPTK
- Ardhana, Wayan. 1992. *Beberapa Metode Statistik untuk Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ardhana, Wayan. 1992. *Sistem Pendidikan Nasional, Realisasi. Permasalahan dan Pemecahannya*. Makalah Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II, Medan 4-8 Februari 1992.
- Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research For Education : An Introduction To Theory and Methode*. Boston : Allvn and Bacon. Inc.
- Degeng, I Nyoman Suhana. 1989. *Ilmu Pengajaran : Taksonomi Variabel*. Jakarta : Depdikbud, Ditjen Dikti, P2LPTK.
- Degeng, I Nyoman Sudana. 1989. "Taksonomi Variabel Pengajaran". *Forum Penelitian*, 1 (2). 133-151.
- Depdikbud. 1984. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0209/U/1984*. Jakarta : Depdikbud.

- Depdikbud. 1987. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0412/U/1987. Jakarta:
- Depdikbud. Depdikbud, 1991. Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan 1991/1992. Kanwil Depdikbud Prop. Kalimantan Tengah.
- Dick, W. dan Carey, L. 1985. *The Systematic Design of Instruction*. (Second Edition). Glenview-Illinois : Scott, Foresman and Company.
- Dimiyati, M. 1988. Landasan kependidikan - Suatu Pengantar Pemikiran Kalimantan Tentang Kegiatan Pendidikan. Jakarta : Depdikbud, Ditjen Dikti, P2LPTK.
- Kalimantan Tengah Dalam Angka, 1990.
- Mahmud. Darlis. 1980. "Indikator-Indikator Relevansi Pendidikan Dalam Rangka Memikirkan Kurikulum Bagi Negara Yang Bermasyarakat Majemuk". *Analisis Pendidikan*, I (3), 50-53.
- Napitupulu, W.P. 1988. "Belajar Sambil Bekerja". *Jurnal Pendidikan*, Nomor 1, 19-32.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima, 1989/1990-1993-1994, Kalimantan Tengah, 1989.
- Soedijarto, 1977. *Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dan Implikasinya bagi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tenaga Kependidikan*. Jakarta : BP3K.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.